

# Rindu Pemimpin Bernurani

Oleh : Brigida Intan

"TIDAK ada yang mampu sungguh-sungguh menutupi kebenaran, kecuali kekuasaan." Kiasan ini seolah melukiskan keadaan Indonesia saat ini yang begitu kompleks. Aktor-aktor politik Indonesia mengalami turun pamor ketika dilanda berbagai masalah yang kompleks. Kunjungan kerja (kunker) bahkan pelesir oleh beberapa petinggi daerah di saat bencana asap di Sumatera dan Kalimantan, menunjukkan inkonsistensi pemimpin yang sejatinya dapat menanggulangi penderitaan masyarakat. Dimana nurani dan komitmen seorang pemimpin?

## Kehilangan nurani

Berbagai interpretasi seolah menjadi oposisi para pemain politik, bahkan tak tampak lagi *manunggaling kawula-gusti*, persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Target politik untuk menciptakan kehidupan aman dan tentram dalam bernegara nyaris binasa. Ada jembatan besar antara masyarakat dengan para pemimpin. Nurani seolah ditutupi oleh ambisi pribadi dan mengutamakan kepentingan kelompok.

Begitu kompleks dan dangkalnya kepekaan sosial dari elit menunjukkan bahwa Indonesia mengalami bencana kemanusiaan besar yang ditimbulkan dari pemangku-pemangku kepentingan. Bahkan hukum yang seharusnya dapat melindungi, sekarang menjadi ancaman bagi masyarakat yang tak berdaya. Peringatan 10 Tahun Pejuang HAM Munir seolah wacana yang tak berujung, atau masalah pembunuhan aktivis pejuang kebenaran lain yang tidak mendapat perhatian. Hasilnya, Indonesia sulit bangkit dari keterpurukan karena mental

dangkal para pemegang kekuasaan dan institusi.

Berbagai transformasi hukum masih menimbulkan multi interpretatif, sehingga dapat menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Bahkan selalu ada perombakan baik UUD maupun kabinet yang terlihat lebih mendahulukan kepentingan politiknya masing-masing dan kurang mengakomodasi aspirasi rakyat. Pada akhirnya, sistem perombakan yang sudah membudaya menciptakan konstitusi dengan sistem *check and balances* yang tidak seimbang. Setidaknya ada program sosialisasi dan tanggapan publik, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa



urusan konstitusi adalah urusan elit. Penekanan mendasar akan nilai hukum juga sangatlah penting agar masyarakat tidak terperdaya atau terintervensi oleh sistem yang berlangsung.

## Kunci membuka nurani

Sebagai kunci untuk memahami nurani kepemimpinan, ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diterapkan oleh pemer-

intah. *Pertama*, nurani berlandaskan konstitusi bahwa prinsipnya tidak hanya sekedar produk hukum namun juga tidak mudah diubah karena keinginan suara mayoritas yang bersifat sementara.

*Kedua*, nurani berlandaskan

prinsip demokrasi, intinya ada akses bagi semua warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara, serta keamanan yang penting bagi negara besar dan heterogen.

*Ketiga*, nurani berlandaskan kecakapan politik, dimana ada kerjasama dalam menetapkan kerangka pembangunan, sehingga masyarakat merasa aman, pembatasan konstitusi menjamin pemimpin adalah abdi bukan majikan bagi rakyat. *Keempat*, nurani berdasarkan agenda terkontrol, masyarakat diberi kesempatan eksklusif untuk menentukan agenda yang baik diputuskan oleh pemerintah.

Esensi di atas menyiratkan bahwa masyarakat hanya rindu kepada pemimpin yang mengangkat martabat dan keselamatan bangsa dengan nuraninya. Konsolidasi nurani pemerintah dan rakyat dapat terbentuk jika ditandai oleh tertatanya perangkat dari sistem politik, sehingga menghasilkan pemerintah yang memiliki nurani berprinsip dan pada saatnya ada prospek cerah yang dinanti masyarakat Indonesia.

Elemen nurani kepemimpinan yang kuat didasarkan pada kualitas moral dan intelektual tinggi, lewat aplikasi yang berkesinambungan. Tidak ada lagi generasi yang mengeluh akan keserakahan para leluhurnya karena di masa mendatang situasi dengan tantangan yang lebih besar telah menanti. Bertindak dengan hati dan akal budi adalah kunci utama bagaimana para pemimpin besar mampu memimpin demi negaranya. Proses mencetak pemimpin yang bernurani dan berhati selakanya diterapkan pada setiap elemen bangsa dan pemangku kepentingan. \*\*\*

Brigida Intan, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

